

PERKAWINAN USIA DINI DI DESA GEMBONG KULON



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD KRISNA ADHITIYA

5116500131

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2020**

PERKAWINAN USIA DINI DI DESA GEMBONG KULON



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD KRISNA ADHITIYA

5116500131

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERKAWINAN USIA DINI DI DESA GEMBONG KULON

MUHAMMAD KRISNA ADHITIYA

NPM. 5116500131

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 27 Juli 2020

Pembimbing I



Dr. Hj. Suci Hartati S.H., M.Hum.
NIDN. 0605105501

Pembimbing II



Dr. Evy Indriasari S.H., M.H
NIDN. 0605037501

Mengetahui.
Dekan



Dr. Ahmad Irwan Hamzani, S.H.I, M.Ag.
NIDN 0615067604

PENGESAHAN

PERKAWINAN USIA DINI DI DESA GEMBONG KULON

MUHAMMAD KRISNA ADHITIYA

NPM 5116500131

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh:

Tegal, 27 Juli 2020

Penguji I



Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I, M.Ag
NIDN. 0615067604

Penguji II



Ratna Riyanti S.H., M.H.
NIDN 0628117002

Pembimbing I



Dr. Hj. Suci Hartati S.H., M.Hum.
NIDN 0605105501

Pembimbing II



Dr. Evy Indriasari S.H., M.H.
NIDN 0605037501

Mengetahui,
Dekan



Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I, M.Ag.
NIDN 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Krisna Adhitiya
NPM : 5116500131
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 24 Februari 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERKAWINAN USIA DINI DI DESA
GEMBONG KULON

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 27 Juli 2020

Yang menyatakan



Muhammad Krisna Adhitiya

ABSTRAK

Muhammad Krisna Adhitiya, 5116500131, Perkawinan Usia Dini Di Desa Gembong Kulon, Pembimbing Dr. Hj. Suci Hartati, S.H, M.Hum. dan Dr. Evy Indriasari, S.H, M.H.

Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan isteri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius (adanya aspek ibadah). Perkawinan usia dini merupakan apabila salah satu atau kedua calon mempelai berusia di bawah 19 tahun.

Penelitian ini bertujuan : (1) Mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan adanya perkawinan usia dini di Desa Gembong Kulon Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. (2) Mengkaji peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang agar masyarakat Desa Gembong Kulon mempunyai kesadaran tentang Undang-Undang perkawinan.

Jenis penelitian adalah deskriptif pendekatan yang di gunakan Normatif teknik pengumpulan datanya melalui penelusuran secara konvensional dan online dan di analisis dengan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perkawinan di usia muda dipengaruhi oleh berbagai macam faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan di usia muda diantaranya; faktor ekonomi, faktor orang tua, serta faktor adat setempat. Terjadinya perkawinan usia dini di Desa Gembong Kulon adalah karena Kehamilan Tidak Diinginkan, faktor ekonomi dan faktor karena orang tua. Salah satu peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang agar masyarakat Desa Gembong Kulon mempunyai kesadaran tentang Undang-Undang perkawinan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang Undang-undang Perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian inidiharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Kata Kunci : perkawinan, perkawinan usia dini, faktor-faktor pendorong, peran Kantor Urusan Agama

ABSTRACT

Muhammad Krisna Adhitiya, 5116500131, *Early Childhood Marriage In The Village of Gembong Kulon*, Advisor Dr. Hj. Suci Hartati, S.H, M.Hum. and Dr. Evy Indriasari, S.H, M.H.

Marriage is an agreement whose purpose is to realize happiness between the two parties (husband and wife couple), is not limited in a certain time and has a religious nature (the aspect of worship). Early marriage is when one or both candidates for the bride are under 19 years old.

This study aims: (1) To examine the factors that cause early marriage in Gembong Kulon Village, Talang District, Tegal Regency. (2) Examine the role of the Talang District Office of Religious Affairs so that the people of Gembong Kulon Village have an awareness of the Marriage Law.

This type of research is a descriptive approach that is used Normative data collection techniques through conventional and online search and analyzed with qualitative.

The results showed that the cause of marriage at a young age was influenced by a variety of factors that drove them to get married at a young age including; economic factors, parental factors, as well as local custom factors. The occurrence of early marriage in the village of Gembong Kulon is due to unwanted pregnancy, economic factors and factors due to parents. One of the roles of the Office of Religious Affairs in Talang Subdistrict so that the people of Gembong Kulon Village have an awareness of the Marriage Law is to conduct socialization on the Marriage Law.

Based on the results of this research it is hoped that it will become material information and input for students, academics, practitioners and all parties who need it in the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal

Keywords: marriage, early marriage, driving factors, the role of the Office of Religious Affairs

MOTTO

‘Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng’

(Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak Adin Safrudin dan Ibu Yati Rohayati tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian serta do'a dan yang selalu mendidik, memperjuangkan masa depanku dengan penuh kesabaran, tak peduli beratnya perjuangan.
2. Segenap Keluarga yang telah mendukung untuk menyelesaikan studi ini.
3. Buat teman-teman yang sudah membantu saya menulis.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah Swt., *alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw. Yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari beberapa pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd (Rektor Univeristas Pancasakti Tegal)
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.Hi., M.Ag. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
3. Kanti Rahayu, S.H., M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancaskti Tegal)
4. Dr. H. Sanusi, S.H., M.H. (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancaskti Tegal)
5. Imam Asmarudin, S.H., M.H. (Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancaskti Tegal)
6. Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H. (Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
7. Dr. Hj. Suci Hartati, S.H., M.Hum (Dosen Pembimbing I), Dr. Evy Indriasari S.H., M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strara 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Sebagai amal shalih.

9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
11. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt. Membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Tegal, 27 Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latarbelakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	12
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	12
1. Pengertian Perkawinan di Indonesia	12
2. Perkawinan Usia Dini	15

3. Hikmah dan Tujuan Perkawinan	18
4. Jenis Pernikahan atau Perkawinan	20
5. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	22
6. Asas-asas Perkawinan	27
7. Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Melakukan Perkawinan Usia Dini	30
B. Aspek Perkawinan Usia Dini dalam Undang-Undang Perkawinan ...	36
C. Tinjauan Umum Tentang Kantor Urusan Agama	40
1. Pengertian Kantor Urusan Agama	40
2. Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Adanya Perkawinan Usia Dini di Desa Gembong Kulon Kecamatan Talang Kabupaten Tegal	47
B. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang agar Masyarakat Desa Gembong Kulon Mempunyai Kesadaran Tentang Undang-Undang Perkawinan	54
1. Letak Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang	54
2. Batas Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang	54
3. Jumlah Desa Kecamatan Talang	55
4. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang	55
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Perkawinan merupakan perjanjian (akad), tetapi makna perjanjian yang dimaksudkan di sini berbeda perjanjian yang di atur dalam Buku III KUH Perdata. Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan isteri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius (adanya aspek ibadah). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perkawinan hanya di pandang suatu hubungan-hubungan perdata. Karenanya setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus memberitahukan hal itu kepada Pegawai Catatan Sipil di tempat tinggal salah satu pihak. Bila kedua calon suami isteri tidak bertempat tinggal dalam wilayah Catatan Sipil yang sama, maka pengumuman itu akan dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Sipil di tempat tinggal masing-masing pihak.

Ketentuan tentang perkawinan diatur dalam KUH Perdata Pasal 26 sampai Pasal 102 KUH Perdata. Ketentuan umum tentang perkawinan hanya terdiri atas satu pasal yang disebutkan dalam 26 KUH Perdata, bahwa ‘undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan saja’. Hal ini berimplikasi bahwa suatu perkawinan hanya sah

apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sementara itu persyaratan menurut agama di kesampingkan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ‘ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islâm maupun hukum positif (negara). Sebelum lahirnya undang –undang perkawinan mengenai tata cara perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat masing-masing¹.

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) yaitu: ‘Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.19 tahun 2018 Tentang Pencatatan perkawinan Bab II pasal 4 yaitu: Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 tahun harus mendapat dispensasi dari pengadilan. Pasal-pasal tersebut sangat jelas sekali hampir tidak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia

¹ Zulfiani, “ *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”, *Jurnal Hukum*, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember, 2017, hlm.1

untuk pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Namun itu saja belum cukup, masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin, yakni jika calon suami dan calon istri belum genap berusia 21 tahun maka harus ada ijin tertulis dari orang tua atau wali nikah.

Ijin tertulis tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.19 tahun 2018 tentang Pencatatan perkawinan Bab II pasal 4 yaitu: Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat ijin tertulis dari kedua orangtua. Ijin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua atau wali. Jadi tetap batasan usia pernikahan adalah, minimal usia 19 tahun untuk pria dan wanita. Apa bila usia belum mencapai persyaratan (usia 19 tahun), maka harus mendapat dispensasi dari pengadilan dan tetap didampingi oleh kedua orang tua.

Perkawinan usia dini merupakan apabila salah satu atau kedua calon mempelai berusia di bawah 19 tahun. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. usia perkawinan yang ideal bagi perempuan adalah 21-25 tahun, sedangkan bagi laki-laki adalah 25-28 tahun. Karena pada usia tersebut organ reproduksi pada perempuan sudah berkembang dengan baik dan kuat, serta secara psikologis sudah dianggap matang untuk menjadi calon orang tua bagi anak-anaknya. Sementara kondisi fisik dan psikis laki-laki pada usia tersebut juga sudah kuat sehingga mampu menopang kehidupan keluarga dan melindunginya baik secara psikis, emosional, ekonomi, dan sosial.

Didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Kondisi obyektif perkawinan dini dimaksud adalah bisa membuat anak-anak perempuan lebih mungkin putus sekolah, juga dapat menimbulkan berbagai resiko, baik bersifat biologis seperti kerusakan organ-organ reproduksi, kehamilan muda, dan resiko psikologis berupa ketidakmampuan mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Walaupun telah ada batas umur dalam Undang-undang perkawinan yakni 19 tahun bagi calon suami istri akan tetapi tidak menjamin kebahagiaan pasangan suami istri, sehingga persiapan harus matang. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten². Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Pembatasan perkawinan dimaksudkan agar manusia tidak generasi yang lemah meninggalkan generasi yang lemah dapat terwujud. Salah satu usaha tersebut adalah perkawinan dilakukan hanya oleh pasangan yang sudah masak jiwa raganya³. Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak,

² Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama RI, 2003), hal. 19

³ Ria Guswintari, *Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Perkara Nomor: 0010/Pdt.P/2013/PA.Sal)*, (Skripsi Sarjana Hukum fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015), hlm. 66

karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda.

Dari kedua konsepsi hukum agama dan negara tersebut sesungguhnya berorientasi pada kemaslahatan manusia. Namun demikian hukum tidak lebih sekedar aturan-aturan normatif yang mengatur pola perilaku masyarakat, banyaknya persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat khususnya dalam hal perkawinan, maka hukum perkawinan dituntut untuk dapat memberi jawaban atas persoalan tersebut. Untuk itu, hukum seharusnya berkembang sesuai dengan perubahan zaman sehingga mampu mengakomodir nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat termasuk dalam hal ini nilai adat, tradisi dan agama.

Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat atau orang tua yang belum menyadari pentingnya hukum mengenai batasan usia untuk melaksanakan perkawinan. Tak jarang akibatnya merugikan perkembangan fisik dan mental anaknya sendiri. Kenyataan ini terjadi di Desa Gembong kulon Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Di Desa ini ada beberapa (4 kasus) sebagian masyarakat melangsungkan perkawinan di usia muda sehingga tujuan dari perkawinan itu sendiri kurang disadari, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari hal tersebut maka penulis mengambil judul

PERKAWINAN USIA DINI DI DESA GEMBONG KULON

B. Rumusan Masalah

Bahwa ketertarikan penulis untuk meneliti tentang Perkawinan Usia Dini, didasarkan pada pengamatan penulis atas kejadian adanya perkawinan usia dini di Desa Gembong Kulon Kecamatan Talang Kabupaten Tegal domisili dari penulis, sehingga rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya perkawinan usia dini di Desa Gembong Kulon Kecamatan Talang Kabupaten Tegal ?
2. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang agar masyarakat Desa Gembong Kulon mempunyai kesadaran tentang Undang-Undang perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan adanya perkawinan usia dini di Desa Gembong Kulon Kecamatan Talang Kabupaten Tegal
2. Mengkaji peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang agar masyarakat Desa Gembong Kulon mempunyai kesadaran tentang Undang-Undang perkawinan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam upaya memperluas wawasan dan pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya mengenai perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Bagi masyarakat, Memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana komunikasi interpersonal yang terjalin antara suami-isteri yang melakukan perkawinan usia dini, dengan begitu dapat dijadikan pertimbangan sebelum melakukan perkawinan usia dini.
- b. Bagi peneliti lain, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sebagai acuan bagi peneliti lain yang berminat terhadap penelitian tentang perkawinan usia dini.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun jurnal ataupun penelitian yang berhubungan dengan laporan skripsi ini antara lain :

1. Skripsi yang di tulis oleh Rabbil Sonya Gesa, Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo), Dalam skripsi ini penetapan Nomor : 030/Pdt.P/2010/PA.Skh, Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Dalam kasus tersebut calon pengantin perempuan telah 2 bulan mengandung hasil hubungannya dengan anak Pemohon. Sehingga menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah

umur dalam penetapan izin perkawinan di Pengadilan Agama Sukoharjo.

2. Skripsi yang di tulis oleh Ganang Ngestu W, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Nasional (Studi Kasus di Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan pada Perkara Nomor 0377/Pdt.P/2015/PA.Pwd), dalam skripsi ini Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam kasus tersebut terjadinya perkawinan usia dini karena rendahnya tingkat pendidikan.
3. Skripsi yang di tulis oleh M. Ibadurrahman, Perkawinan Usia Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kaliwungu Kab.Kendal), Dalam skripsi ini persyaratan usia khususnya bagi calon mempelai perempuan yang di kategorikan sebagai anak (18 tahun) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam kasus yang di tulis oleh M. Ibadurrahman yaitu faktor kebiasaan masyarakat karena anggapan seorang wanita yang menikah lama dianggap perawan tua. Mempelai perempuan berumur antara 14-18 tahun .

Dari beberapa telaah pustaka yang ada penulis menitikberatkan pada faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini di Desa Gembong Kulon

Kecamatan Talang Kabupaten Tegal menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Faktor utama yang mempengaruhinya yaitu : faktor ekonomi, faktor dari orang tua dan faktor kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Hal inilah yang membedakan dari skripsi yang telah ada sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Selain menggunakan data kepustakaan, penulis juga melihat ke lokasi terjadinya perkawinan usia dini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Normatif. Pendekatan Normatif dalam hukum disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan⁴.

3. Sumber Data

⁴ <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, di akses 14 November 2019

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data sekunder digunakan sebagai referensi utama yang sudah tersedia dalam bentuk peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah maupun sumber tertulis lainnya. sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan⁵.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelusuran secara konvensional dan online untuk data sekunder. Penelusuran kepastakaan secara konvensional adalah kegiatan mencari sumber pustaka ke tempat penyimpanan data. Sedangkan penelusuran secara online adalah kegiatan mencari sumber pustaka di dunia maya melalui jaringan internet. Penelusuran kepastakaan secara konvensional di lakukan dengan cara mencari bahan pustaka ke perpustakaan, pembelian buku, jurnal dan mendatangi kegiatan ilmiah (seminar). Sedangkan penelusuran secara online dilakukan dengan searching di internet.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data

⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, Hlm. 137.

ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema yang di sajikan dalam bentuk narasi. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif karena data disajikan secara naratif-deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini menjadi sistematis, maka penulis membagi skripsi ini kedalam empat bab yang masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi Latarbelakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Konseptual

Bab ini berisi teori yang mendeskripsikan pengertian mengenai perkawinan, aspek perkawinan usia dini dalam Undang-Undang Perkawinan, dan pengertian mengenai Kantor Urusan Agama.

BAB III Hasil Penelitian

Bab ini berisi uraian tentang faktor yang menyebabkan adanya perkawinan dini di Desa Gembong Kulon Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dan peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang agar masyarakat mempunyai kesadaran tentang Undang-Undang Perkawinan.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan di Indonesia

Kata nikah berasal dari bahasa Arab nikaahun yang merupakan masdar atau kata asal dari kata nakaha. Sinonimnya tazawwaja kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti adh-dhammu wattadkhul. Perkawinan menurut istilah sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj”⁶. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki.

Beberapa penulis menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Perkawinan berasal dari kata ‘kawin’ yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata ‘an-nikah’ yang menurut bahasa adalah mengumpulkan saling memasukkan, *wathi* atau bersetubuh⁷.

Menurut hukum Islam, perkawinan yaitu suatu akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad tersebut harus diucapkan oleh wali si wanita secara jelas berupa ijab (serah) dan terima

⁶ Abd Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Goup, 2010, hlm. 272

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 10

(kabul) oleh si calon suami yang dilakukan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Apabila tidak demikian, maka perkawinan tidak sah karena bertentangan dengan hadits Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan tidak sah nikah⁸.

Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil⁹, sebab pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan ialah: ‘ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’.

Berdasarkan perundangan ini perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita sehingga dengan istilah lain dipersepsikan perkawinan bagian dari hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara orang dengan orang. Dengan adanya perkawinan maka akan timbul keluarga, yaitu suami, isteri, anak dan harta kekayaan mereka.¹⁰ Namun dalam hukum islam perkawinan bukan sekedar hubungan yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan, tetapi

⁸ Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, hlm. 11.

⁹ Hamid sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: PeNA, 2010 , hlm. 33.

¹⁰ Aulia Muthiah, *hukum islam dinamika seputar hukum keluarga*, Yogyakarta: pustaka baru pres, 2017, hlm. 58

berkaitan dengan fitrah manusia dengan Rasul SAW yang mengacu pada niat seseorang dalam melangsungkan perkawinan¹¹.

Menurut hukum Kristen Katolik, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Dalam hal ini perkawinan menurut agama Kristen Katolik merupakan perbuatan yang bukan saja perikatan cinta antara kedua suami istri, akan tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Selanjutnya dalam pandangan hukum ini perkawinan dapat dikatakan sah apabila kedua calon mempelai telah dibaptis¹².

Menurut hukum Hindu, perkawinan (*wiwaha*) merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka Put, dimana dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti. Apabila suatu perkawinan tersebut tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum hindu maka perkawinan dikatakan tidak sah¹³.

Selanjutnya, menurut hukum perkawinan agama Budha, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih

¹¹ *Ibid.*, hlm. 58

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hlm. 37

¹³ *Ibid.*

(*Metta*), kasih sayang (*Karuna*) dan rasa sepenanggungan (*Mudita*) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha atau Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa. Dalam hal ini perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum perkawinan agama Budha Indonesia¹⁴.

Menurut pendapat para ahli, Anwar Harjono mengatakan Pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan Perempuan untuk membentuk keluarga bahagia¹⁵, dan Wirjono Prodjodikoro berpendapat perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan¹⁶.

Dari pengertian di atas, perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan mengharapkan keridhoan Allah Swt¹⁷.

2. Perkawinan Usia Dini

Perkawinan usia dini bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia.

Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Faktor

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 37

¹⁵ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 47

¹⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 3.

¹⁷ Edwin Hadiyan, *Membangun Kesadaran Masyarakat Mengenai Tradisi Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Hak Anak*, jurnal, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2016. hlm.54

prnyebabnya-pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, karena hamil terlebih dahulu.

Mendefinisikan usia muda (remaja) memang tidak mudah karena kalau penulis lihat sampai saat ini belum ada kata sepakat antara para ahli ilmu pengetahuan tentang batas yang pasti mengenai usia dini, karena menurut mereka hal ini tergantung kepada keadaan masyarakat dimana usia dini itu ditinjau.

Perkawinan usia dini di dalam undang-undang tidak ditemukan istilah pengertian perkawinan usia dini atau pernikahan di bawah umur, istilah ini muncul setelah adanya Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) yaitu: 'Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Jadi menurut undang-undang dikatakan perkawinan usia dini apabila salah satu atau kedua calon mempelai berusia di bawah 19 tahun.

Hukum Islam tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Bahkan hukum Islâm membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak, seperti pemikiran ulama klasik (salaf) seperti imam maliki, syafi'i, Hambali dan Hanafi mereka tidak mensyaratkan mumayyiz (kedewasaan calon pengantin). perkembangan tingkatan pemikiran

manusia¹⁸ Ataupun kedewasaan bagi calon mempelai.¹⁹ Bagi mereka akil dan baliq saja sudah cukup karena, Nabi sendiri menikahi Aisyah dalam usia muda.

Sama halnya hukum islam, hukum adat Indonesia yang berbeda dari satu wilayah dengan wilayah yang lain, hukum tidak tertulis, juga tidak mengenal pemberlakuan umur seseorang di anggap layak untuk menikah. Biasanya seorang anak dinikahkan ketika ia di anggap telah mencapai fase atau peristiwa tertentu dalam kehidupannya, dan ini seringkali tidak terkait dengan umur tertentu.

Bahwa dalam masyarakat yang majemuk yang tingkat pendidikannya belum memadai, terutama masyarakat pedesaan, tidak heran kalau sebagian besar masyarakat masih berpegang pada tradisi, kebiasaan lama oleh leluhur masih kental dipegangnya anantara lain ingin cepat mengawinkan anaknya²⁰.

Undang-undang sendiri juga tidak menutup total celah untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi undang-undang membuka peluang terjadinya perkawinan di bawah umur melalui proses dispensasi nikah oleh pengadilan, dizinkan atau tidaknya tergantung pada hati nurani hakim yang memeriksa dan memutus di pengadilan²¹.

¹⁸ Lutfil Hakim, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010, dalam Syeh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*, Jakarta Pustaka, Al- Kautsar, 2006, hlm. 136

¹⁹ *Ibid*, hlm. 137

²⁰ Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, Bandung: PT Alumni, 2012, hlm.72.

²¹ Afan Sabili, *Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonian Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)*, Semarang, 2018, hlm.27

3. Hikmah dan Tujuan Perkawinan

Dalam ajaran Islam pernikahan mengandung hikmah yang tinggi dan dalam, diantaranya:

- a. Membangun rumah tangga bahagia, damai dan teratur, tidak gampang rusak dan putus, akan tetapi terikat dengan kokoh dan kuat. Bila akad nikah dilangsungkan, berarti kedua belah mempelai sudah berjanji akan sehidup semati, akan hidup setia, sama susah sama gembira
- b. Membangun keluarga yang sah, sehingga setiap keluarga kenal akan ahli familinya, anak kenal terhadap bapaknya dan bapak kenal terhadap anaknya. Dengan demikian terpeliharalah keturunan tiap-tiap keluarga dan tidak menjadi campur aduk dan diragukan lagi tentang asal-usulnya.
- c. Sebagai wadah birahi manusia yang halal, manusia yang tidak bisa mengendalikan nafsu birahi dan menempatkannya sesuai wadah yang telah ditentukan. Pintu pernikahan adalah sarana yang tepat dalam mewadahi aspirasi naluri normal seorang anak keturunan Adam.
- d. Meneguhkan moralitas luhur, dengan menikah dua anak manusia yang berlawanan jenis tengah berusaha dan selalu berupaya membentengi serta menjaga harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah. Akhlak dalam islam sangatlah penting. Lenyapnya akhlak dari diri seseorang merupakan lonceng kebinasaan, bukan saja bagi dirinya bahkan suatu bangsa.

- e. Melahirkan keturunan/generasi yang baik, hikmah menikah adalah melahirkan anak-anak yang shalih, berkualitas dalam iman dan takwa, cerdas secara spiritual, emosional maupun intelektual. Sehingga dengan menikah, orang tua bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya sebagai generasi yang bertakwa dan beriman kepada Allah.

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri atas:

- a. Berbakti kepada Allah;
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia;
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk men jaga keselamatan hidup.

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan antara suami istri.

Menurut soemiyati, tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan dengan laki-

laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.²²

Menurut Hilman Hadikusuma, tujuan perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat yang bersifat kekerabatan adalah 'untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan, untuk kebahagiaan rumah tangga, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan'. Karena sistem keturunan dan kekerabatan di Indonesia antara suku bangsa satu dengan bangsa yang lain berbeda termasuk lingkungan hidupnya serta agama yang dianut berbeda-beda maka tujuan pernikahan adat antara suku bangsa satu dengan bangsa yang lain berbeda-beda²³. Namun perkawinan menurut agama juga berbeda-beda antara agama satu dengan agama yang lain karena masyarakat Indonesia menganut agama yang berbeda-beda.

Dari beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawwadah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

4. Jenis Pernikahan atau Perkawinan

Pernikahan menurut islam :

²² Aulia Muthiah, *op.cit.*, hlm. 60

²³ Hilman Hadikusuma , *op.cit.*, hlm.21-22

a. Nikah *syighor*; seorang wali mengawinkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan tanpa mahar. Point yang terpenting dalam bentuk pernikahan ini adalah tanpa mahar. Kesepakatan tanpa mahar ini yang merupakan hal yang bathil. Berkaitan dengan mahar, yang paling berhak menentukan maharnya adalah pengantin perempuan dan harus diserahkan kepada pengantin perempuan, bukan walinya.

b. Nikah mut'ah / Kawin kontrak Yakni menikah dalam waktu tertentu saja sesuai dengan kesepakatan dalam akadnya. Mut'ah berarti nikmat, nikah mut'ah adalah nikah yang bertujuan mencari kenikmatannya saja. Kaum sunni mengharamkan nikah mut'ah, sementara kaum syi'ah menghalalkannya. Pada kasus orang yang berniat menikahi seorang wanita dalam waktu tertentu saja tetapi tidak dinyatakannya, maka:

- 1) pernikahannya sah secara lahiriah
- 2) Orang tersebut berdosa disebabkan niat yang tidak benar

Nikah mut'ah pernah dihalalkan diawal-awal turunnya Islam, sebagaimana dihalalkannya minum khamr sebelum diharamkannya. Syi'ah menghalalkannya karena mereka hanya menerima hadits-hadits tertentu dari jalur ahlul bait dan tidak menerima dari sahabat selain ahlul bait.

c. Nikah Muhallil Yakni nikah untuk mengakali hukum Allah. Dalam Islam, seseorang yang sudah mentalaq istrinya sebanyak tiga kali maka ia tidak boleh lagi rujuk kepada istrinya tersebut. Pernikahan muhallil

adalah pernikahan sandiwara yang bertujuan untuk melepaskan larangan tersebut (menghalalkan).

5. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Dalam perkawinan yang harus diperhatikan adalah rukun dan syarat perkawinan, yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk berwudhu. Sedangkan Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.

a. Rukun Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan seperti adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan.

1) Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan;
- b) Adanya wali dari pihak calon penganti wanita, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya;

- c) Adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut;
- d) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon penganten laki-laki.

2) Rukun perkawinan menurut Abd. Rahman Ghazali :

- a) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- b) Adanya wali.
- c) Adanya dua orang saksi.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat, hal ini bisa dilihat beberapa pendapat berikut ini :

3) Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a) Wali dari pihak perempuan
- b) Mahar (maskawin)
- c) Calon pengantin laki-laki
- d) Calon pengantin perempuan.
- e) Sighat akad nikah.

4) Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a) Calon pengantin laki-laki.
- b) Calon pengantin perempuan.

- c) Wali.
 - d) Dua orang saksi.
 - e) Sighat akad nikah.
- 5) Menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki.
- 6) Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:
- a) Sighat (ijab dan qabul).
 - b) Calon pengantin perempuan.
 - c) Calon pengantin laki-laki.
 - d) Wali dari pihak calon pengantin perempuan.
- b. Syarat sah perkawinan
- Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Di dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur tentang rukun perkawinan dalam Pasal 14 yaitu dalam perkawinan harus ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, adanya wali dan dua orang saksi, dan ijab qabul.
- 1) Syarat-syarat perkawinan terdapat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang pria yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c) Dalam hal seorang diri kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud dalam ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d) Dalam hal ini kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e) Dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat member izin setelah lebih dahulu mendengarkan orang-orang tersebut Dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- f) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan pasal 7 disebutkan:

- a) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
 - b) Dalam hal penyimpangan terdapat ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
 - c) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).
- 2) Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah:²⁴
- a) Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 7

- b) Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
 - c) Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
 - d) Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
- 3) Syarat-syarat ijab qabul yaitu:
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
 - c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan;
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
 - f) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah;
 - g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

6. Asas-asas Perkawinan

- a. Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 adalah:

1) Asas suka rela

Menurut pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa perkawinan harus didasari persetujuan kedua calon mempelai. Perkawinan disini mempunyai maksud bahwa dalam suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami-istri atau dengan kata lain tidak ada pihak yang memaksa dari manapun.

2) Partisipan Keluarga.

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang untuk membentuk keluarga yang bahagia, maka peran orang tua atau partisipasi keluarga sangat dibutuhkan terutama dalam hal pemberian ijin untuk melaksanakan perkawinan.

3) Perceraian dipersulit

Ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang perceraian terdapat dalam pasal 39 dan 41 UU No 16 tahun 2019, disini dijelaskan bahwa pasangan suami-istri yang hendak bercerai tidak begitu saja dilakukan karena ada akibat-akibat yang harus dipertimbangkan baik bagi diri masing-masing dan juga bagi anak-anaknya, bagi yang sudah mempunyai anak.

4) Asas monogami

Penegasan asas monogami ini diatur dalam pasal 2 ayat (2), pasal 4 dan 5 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan, dan diatur pula dalam pasal 55, 56 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam

bahkan diatur pula dalam al-Quran, yaitu Q.S. An-Nissa ayat 3 yang berbunyi : ‘dan Jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan bila kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil maka kawinilah seorang saja²⁵. Dengan demikian bahwa perkawinan menurut UU mempunyai asas monogami, namun demikian tidak menutup tidak menutup kemungkinan bagi suami untuk mempunyai lebih dari satu istri, hal ini harus mendapat persetujuan dahulu dari pihak-pihak yang bersangkutan.

5) Kematangan calon suami.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas umur suatu perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan wanita, maka dari itu perkawinan yang masih di bawah umur tidak diperbolehkan, karena perkawinan memerlukan kematangan dari kedua calon mempelai tersebut baik jiwa dan raga agar tercipta suatu keluarga yang bahagia.

b. Asas-asas perkawinan menurut ayat-ayat Al-Qur'an

- 1) Asas kebebasan dalam memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at islam.

²⁵ Dahlan hasyim, *Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan*, jurnal, Volume XXIII No. 2 April–Juni 2007, hlm. 301

- 2) Asas mawaddah wa rahmah prinsip ini di dasarkan pada firman Allah QS. ar-Rum: 21. mawaddah wa rahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya.
 - 3) Asas saling melengkapi dan melindungi prinsip ini di dasarkan pada firman Allah SWT. Yang terdapat pada surah QS. al-Baqarah: 187 yang menjelaskan isteri-isteri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.
 - 4) Prinsip mu'asarah bi al-ma'ruf, prinsip ini di dasarkan pada firman Allah SWT. Yang terdapat pada surah QS. an-Nisa: 19 yang memerintahkan setiap laki-laki untuk memperlakukan isterinya dengan cara yang ma'ruf. Di dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.
7. Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Melakukan Perkawinan Usia Dini
- Seiring dengan perkembangan zaman perkawinan di bawah umur semakin marak terjadi dan kejadian tersebut di sebabkan berbagai macam faktor bermuculan dalam masyarakat baik dalam masyarakat desa maupun masyarakat kota, walaupun undang-undang telah melarang melaksanakan perkawinan di bawah umur namun dispensasi terhadap

perkawinan tersebut masih di berikan terhadap anak oleh lembaga pengadilan yang diajukan oleh orang tua anak.

Faktor terjadinya perkawinan dibawah umur di sebabkan oleh dua faktor yaitu²⁶ :

a. Faktor internal (Keinginan dari diri sendiri)

Faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda dapat berasal dari internal yakni faktor yang berasal dari dalam individu. Keinginan dari anak yang memilih menikah atas keinginan sendiri karena telah siap mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Pasangan ini menikah dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Kondisi ini yang akhirnya membuat keputusan untuk melangsungkan perkawinan di usia muda tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi kedepannya.

Anak melakukan perkawinan di usia muda dikarenakan konsep diri anak tersebut. Mereka menganggap bahwa setelah melakukan perkawinan di usia muda sama sekali tidak membuat mereka minder atau tidak percaya diri baik di lingkungan masyarakat maupun pergaulan mereka. Hanya sedikit dari anak yang membatasi pergaulannya setelah kawin dikarena sudah memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga.

²⁶ Zulfiani, *op.cit.*, hlm.217

Selain keinginan dari diri sendiri, faktor lain yang mendorong anak melakukan perkawinan di usia muda berasal dari keinginan dari orang tua. Orang tua memiliki posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya harus dihormati, ditaati, dan dipatuhi. Orang tua menginginkan anaknya untuk segera menikah karena adanya rasa takut dari dalam diri orang tua jika anaknya suatu saat melakukan perbuatan yang membuat malu nama baik orang tua. Selain itu, ada juga yang menikahkan anaknya agar dapat terbantu dalam segi pekerjaan. Dukungan dari orang tua yang mempengaruhi perkawinan usia muda dimana Orang tua merasa khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga mengawinkan anaknya

b. Faktor eksternal

Berdasarkan hasil pengamatan dalam masyarakat juga mengungkapkan faktor eksternal juga menyebabkan anak melakukan perkawinan usia muda diantaranya disebabkan oleh:

- 1) Faktor ekonomi, Minimnya ekonomi menyebabkan orang tua menikahkan anaknya di usia muda, daripada menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Orang tua yang memiliki anak banyak akan cenderung lebih banyak mengalami kesulitan dalam hal keuangan jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki sedikit anak. Dan perkawinan usia

muda ini sering terjadi pada masyarakat yang tinggal di desa. Biasanya anak berasal dari keluarga kurang mampu. Hal ini tentu akan berdampak baik anak-anak maupun orang tuanya. Si anak bisa mendapatkan kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang.

- 2) faktor hamil diluar nikah, faktor sosial, yaitu banyak anak-anak yang hamil di luar nikah dan diakibatkan karena pergaulan budaya bebas yang mereka dapatkan melalui vitur-vitur internet sehingga membuat mereka ingin mencobanya. Pengaruh internet yang seringkali memuat situs porno atau menampilkan pornografi. Mereka hanya mengunggulkan keinginan untuk meniru apa yang dilihat tanpa melakukan penyaringan. faktor hamil diluar nikah yang biasa disebut sebagai kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan merupakan suatu kondisi dimana pasangan tidak menghendaki adanya proses kelahiran dari suatu kehamilan. Dan ini terjadi akibat pergaulan bebas yang dikenal dengan bermula dari hubungan seks pranikah atau seks bebas.
- 3) Faktor putus sekolah yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Sebagian besar putus sekolah disebabkan karena ekonomi keluarga yang kurang baik dan juga pengaruh dari lingkungan, serta keinginan dari anak tersebut untuk tidak sekolah. Bahkan mereka mengatakan lebih

baik bekerja yang dapat menghasilkan uang daripada sekolah yang belum tentu berhasil dan malah menghabiskan uang orang tua.

- 4) Faktor Biologis, Faktor biologis ini muncul salah satunya karena Faktor Media Massa dan Internet diatas, dengan mudahnya akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. Maka, terjadilah hubungan di luar nikah yang bisa menjadi hamil di luar nikah. Maka, mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anak gadisnya.

Menurut Mustamin, bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkawinan di bawah umur adalah :

- a. Keterlanjuran menjalin hubungan seksual yang menyebabkan perempuan hamil. Karena itu wajib mereka kawin sehingga tidak melihat lagi dari segi umur, atau tidak melihat berapa umurnya, apakah bertentangan dengan hukum atau tidak.
- b. Pendidikan (putus sekolah), tidak ada pekerjaan lain sehingga gairah seksual yang lebih dominan menuntut adanya penyaluran, semua ini sangat mungkin mempengaruhi adanya perkawinan dibawah umur.
- c. Ekonomi, sebagian orang tua berpandangan bagaimana mempercepat anaknya menikahkan atau melepaskan anaknya, apakah lepas dari menjaga karena dianggap perempuan yang paling susah untuk

dijaga, sehingga takkala ada yang datang melamar apalagi laki-laki yang melamarnya itu sudah jelas mata pencahariannya, maka sudah tidak panjang lagi cara berpikirnya alias langsung diterima sekalipun anaknya belum bisa dinikahkan menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 (perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974)²⁷.

Pandangan lain, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur adalah²⁸ :

- a. Faktor ekonomi, karena keadaan keluarga yang hidup dalam keadaan sosial ekonomi rendah/kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dengan menikahkan anaknya dibawah umur akan mendapat sumbangan-sumbangan dari handal taulannya;
- b. Faktor rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan, atau orang tua kurang memahami pula pendidikan bagi anak-anaknya, padahal semua itu sangatlah penting diketahui;
- c. Faktor kekhawatiran orang tua, orang tua merasa cemas dan gelisah jika anak perempuan maupun laki-lakinya belum juga mempunyai pendamping (pacar) lebih-lebih jika anaknya perempuan; dan
- d. Faktor lingkungan tempat mereka tinggal, keluarga memiliki anak perempuan maupun laki-laki belum memiliki pendamping (pacar) maka orang tua merasa malu, karena teman-teman sebaya anaknya

²⁷ Kamaruddin, *Problematik Perkawinan Di Bawah Umur di Kota Kendari*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 10 No. 2, Juli 2017, hlm.108-109

²⁸ Teti Sriharyati, *Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur di Desa Blandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes* (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2012), hlm. vii

sudah banyak yang memiliki pendamping (pacar) bahkan sudah menikah

B. Aspek Perkawinan Usia Dini dalam Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (negara). Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta, benda dan akibat hukum suatu perkawinan.

Sejak di undangkan hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa ‘Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun’. Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 mengalami perubahan terutama di batas umur minimal untuk menikah yakni 19 tahun untuk pria dan wanita. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.²⁹

Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dalam hal ini pemerintah telah memberikan Kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan, karena mengingat perkawinan yang dilakukan agar kelak dapat terbina kekal abadi berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sampai hayat memisahkan ke duanya serta untuk menunjang program kependudukan.³⁰

Penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”³¹

Secara mendasar, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mendorong lebih luas terjadinya perkawinan anak terutama dengan menggunakan frasa

²⁹ Zulfiani, " *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* " , Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm. 215

³⁰ *Ibid*, hlm. 216

³¹ *Ibid*.

penyimpangan tanpa ada penjelasan yang lebih rigid terhadap penyimpangan tersebut. Argument terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sudah dijelaskan dengan baik, untuk itu perlu pengetatan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) terutama pengetatan frasa penyimpangan dan penghapusan frasa pejabat lain. Selain itu, Ketentuan pengetatan ini diadakan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dalam hal ini dapat dilihat bunyi pasal yang menyangkut dengan Pasal 15 ayat (1) “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni calon suami dan isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Sedangkan bunyi dari ayat (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, izin orang tua wajar karena mereka yang belum berumur 21 dianggap belum dewasa menurut hukum.³²

³² Zulfiani, *op.cit*, hlm.216

Sementara untuk pertimbangan hakim sendiri Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan suatu pengaturannya dengan menyatakan sebagai berikut: "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua". Dengan demikian pengadilan akan mengeluarkan surat izin perkawinan yang belum mencapai usia dewasa melalui proses hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam konteks hak anakpun sangat jelas tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak, dan menindak lanjuti dari perubahan undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dimana peran orang tua juga dapat mencegah perkawinan anak di bawah umur.³³

Perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Menurut Pasal 60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan

³³ *Ibid.*, hlm.216

dengan salah seorang calon isteri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan (Pasal 62, 63, dan 64 KHI).³⁴

Hakim juga sebagai pihak penegak hukum, setiap penerapan hukum atau keputusan hukum yang dibuat oleh hakim hendaklah sejalan dengan tujuan hukum yang hendak dicapai oleh syari'at. Apabila penerapan suatu rumusan akan bertentangan hasilnya dengan kemaslahatan manusia, maka penerapan hukum tersebut harus ditanggihkan. Demi pencapaian kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dari penerapan hukum-hukum, pengecualian secara sah perlu diberlakukan.³⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Kantor Urusan Agama

1. Pengertian Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementrian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan³⁶. KUA sebagai ujung tombak kementrian agama yang memiliki tugas menangani urusan di bidang keagamaan, salah satunya di bidang perkawinan yaitu melaksanakan pengawasan nikah dan rujuk. Maka pemerintah melalui kementrian agama menunjuk penghulu untuk melakukan pengawasan nikah atau rujuk

³⁴ *Ibid*, hlm 217

³⁵ *Ibid*.

³⁶ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h.12*

menurut agama islam dengan cara mencatat setiap peristiwa nikah yang telah terjadi.³⁷

2. Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama diwilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomer 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA,yaitu:

³⁷ Asep Sihabul Millah, <https://www.scribd.com/doc/218786741/PERAN-PENGHULU-DALAM-IMPLEMENTASI-UU-NOMOR-1974-TENTANG-PERKAWINAN-pdf>, diakses tanggal 23 desember 2019

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (dokitik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah³⁸.

Selain yang tersebut diatas Kepala KUA juga mempunyai tugas ;

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Menetapkan merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama.
- b. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- d. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
- e. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk dan Keluarga Sakinah.

³⁸ *Ibid*, Depag RI, h.25

- f. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta Ibadah Sosial.
- g. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah.

Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan selain memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan

kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat Pembantu PPN.

Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Di samping itu Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan³⁹

Dari uraian diatas, maka berdasarkan KMA tersebut tugas-tugas pokoknya adalah :

- a. Pelayanan nikah dan rujuk.
- b. Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. Secara rinci tugas tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

- 1). Pelayanan Nikah dan Rujuk Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

³⁹ Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h. 3

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan. Pencatatan perkawinan tersebut melakukan penelitian yang

c. seksama agar terpenuhi, baik ketentuan perundang-undangan maupun kaidah munakahat dan diperoleh data yang akurat. Kepala KUA selaku PPN harus dapat mempertanggungjawabkan pencatatan yang dilakukannya. Untuk itu ia dibantu oleh Pembantu PPN yang diharapkan lebih dapat mengetahui keadaan sehari-hari dari mereka yang melakukan pernikahan. Tugas pelayanan nikah dan rujuk oleh pembantu PPN adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima informasi/pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon isteri dan wali) dan mencatatnya dalam buku model N10.
- 2) Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainya maupun berdasarkan wawancara langsung.
- 3) Memberikan penasihatan kepada masing-masing pihak tentang hal hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami-isteri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT dari Puskesmas.

- 4) Mengantar mereka ke KUA Kecamatan untuk melaporkan rencana pernikahan, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan.
- 5) Melakukan sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e mereka yang melaporkan akan melakukan rujuk⁶. b. Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa Dalam KMA Nomor 298 tahun 2003 disebutkan bahwa Pembantu PPN selain memberikan pelayanan nikah dan rujuk jugamempunyai tugas melakukan pembinaan kehidupan beragam Islam di Desa. Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa dapat berupa kegiatan yang bersifat *ubudiyah mahdhah* (langsung berhubungan dengan Allah) dan dapat berupa kegiatan yang bersifat *ubudiyah ijtimaiyah* (hubungan antar sesama umat).
- 6) Mengkoordinasikan dan menggerakkan lembaga-lembaga semi resmi yang membantu tugas departemen agama (BKM, BP4, P2A dan LPTQ) ditingkat Desa. Dalam perkembangannya Pembantu Penghulu yang berdasarkan peraturan baru tidak diperpanjang dan perekrutan kembali.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Adanya Perkawinan Usia Dini di Desa Gembong Kulon Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

Beberapa penduduk yang melakukan perkawinan usia dini

No	Informan	Tingkat Pendidikan Terakhir	Usia Menikah
1	A	SMP	15 Tahun
2	B	SMP	16 Tahun
3	C	SMP	15 Tahun
4	D	SMP	16 Tahun

Keterangan: Data diperoleh dari Balaidesa Gembong Kulon

Faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan usia dini menurut Mubasyaroh⁴⁰:

1. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya diusia muda, yang bertujuan untuk meringankan beban orang tua , sehingga sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi keluarga. Selain itu, kondisi ekonomi yang tergolong hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja menjadikan anak tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya. Daripada menyekolahkan

⁴⁰ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Jurnal, Yudisia, Vol.7, No.2, Desember 2016.

anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Orang tua yang memiliki anak banyak akan cenderung lebih banyak mengalami kesulitan dalam hal keuangan jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki sedikit anak. Sebaliknya pula dengan ketidak adanya ekonomi dalam rumah tangga turut pula mempengaruhi dampak pertengkaran bahkan perceraian dalam rumah tangga. Sebagian orang tua berpandangan bagaimana mempercepat anaknya menikahkan atau melepaskan anaknya, apakah lepas dari menjaga karena dianggap perempuan yang paling susah untuk dijaga, sehingga takkala ada yang datang melamar apalagi laki-laki yang melamarnya itu sudah jelas mata pencahariannya, maka sudah tidak panjang lagi cara berpikirnya alias langsung diterima sekalipun anaknya belum bisa dinikahkan menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019

2. Faktor Orang Tua

Terjadinya perkawinan usia dini dapat juga karena pengaruh paksaan dari orang tua. Orang tua memiliki posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya harus dihormati, ditaati, dan dipatuhi. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya lebih cepat karena adanya rasa takut dari dalam diri orang tua jika anaknya suatu saat melakukan perbuatan yang membuat malu nama baik orang tua. Selain itu, ada juga yang menikahkan anaknya agar dapat terbantu dalam segi pekerjaan. Dukungan dari orang tua yang mempengaruhi perkawinan usia muda dimana Orang tua merasa khawatir terkena aib

karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga mengawinkan anaknya.

3. Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)

Terjadinya suatu kehamilan diluar pernikahan diakibatkan karena pergaulan budaya bebas yang mereka dapatkan melalui vitur-vitur internet sehingga membuat mereka ingin mencobanya. Pengaruh internet yang seringkali memuat situs porno atau menampilkan pornografi sehingga anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan suatu ikatan perkawinan yang lebih cepat, guna memperjelas status anak yang sedang dikandung. Perkawinan tersebut memaksa mereka untuk bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta ayah dan ibu, sehingga nantinya akan berakibat pada penuaan dini, karena belum siap secara lahir dan batin. Disamping itu, dengan terjadinya kehamilan diluar perkawinan dan ketakutan orang tua akan terjadinya kejadian tersebut mendorong anaknya untuk menikah di usia yang masih remaja.

4. Melanggengkan hubungan

Perkawinan anak dalam hal ini sengaja dilakukan dan sudah disiapkan semuanya, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini dilakukan supaya status hubungan mereka ada kepastian dan selain itu dapat menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat.

Dengan demikian diharapkan akan membawa dampak positif bagi keduanya.

5. Karena tradisi keluarga

Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat, ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung secara terus-menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Keluarga memiliki anak perempuan maupun laki-laki belum memiliki pendamping (pacar) maka orang tua merasa malu, karena teman-teman sebaya anaknya sudah banyak yang memiliki pendamping (pacar) bahkan sudah menikah. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah baligh dan berakal, sehingga sudah selayaknya dinikahkan.

6. Karena kebiasaan dan adat istiadat setempat

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah presentase perkawinan anak di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun terkadang dianggap menyepelkan dan menghina dan menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.

Menurut A'yun Inaroh⁴¹ dan Rosidi⁴², faktor utama yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini di Desa Gembong Kulon adalah :

1. Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan perkawinan usia dini, guna memperjelas status anak yang dikandung.

Berawal dari hubungan asmara (pacaran) yang terjadi pada informan A dan D. Kemudian berlanjut hingga 'kumpul kebo' (hidup bersama antara laki-laki dan perempuan seolah-olah sebagai suami-isteri) meniru adegan di situs porno sehingga terjadi suatu kehamilan diluar perkawinan karena mereka melakukan hubungan yang melanggar norma, akhirnya memaksa mereka untuk melakukan suatu ikatan perkawinan yang lebih cepat, tidak melihat lagi dari segi umur, atau tidak melihat berapa umurnya, apakah bertentangan dengan hukum atau tidak. Perkawinan tersebut guna memperjelas status anak yang sedang dikandung.

2. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam sebuah rumah tangga yang turut berpengaruh dalam perkawinan usia dini termasuk di desa Gembong Kulon. Di desa Gembong Kulon, kondisi ekonomi setiap keluarganya antara satu keluarga dengan

⁴¹ Wawancara dengan A'yun Inaroh, Kepala Desa Gembong Kulon, di Kantor Balaidesa Gembong Kulon, tanggal 13 Januari 2020 jam 09.00 WIB.

⁴² Wawancara dengan Rosidi, warga Gembong Kulon, di rumah bapak Rosidi, tanggal 13 Januari 2020 jam 20.00 WIB.

keluarga yang lainnya berbeda. Tidak semua keluarga di desa tersebut bisa memenuhi semua keperluan sehari-harinya karena penghasilan yang mereka peroleh belum bisa memadai untuk digunakan keperluan sehari-hari. Masyarakat di desa Gembong Kulon mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam. Diantara mereka ada yang memiliki pekerjaan tetap juga pekerjaan tidak tetap. Oleh karena itu untuk penghasilan yang mereka peroleh setiap harinya tidak menentu.

Faktor tersebut terjadi pada informan C. keluarganya mengalami kesulitan ekonomi kemudian menikahkan anaknya diusia muda dengan laki-laki yang dianggap mampu dalam segi ekonomi, yang bertujuan untuk meringankan beban orang tuanya, sehingga sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi keluarganya. Orang tuanya beranggapan jika anak sudah menikah, maka akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua berharap jika anaknya sudah menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik.

3. Faktor Orang Tua

Faktor orang tua merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak besar. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya jadi perawan tua dan takut apabila anaknya akan melakukan hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. Jika si anak belum juga mendapatkan jodohnya, maka orang tua ikut

mencarikan jodoh buat anaknya dengan catatan jodoh yang akan di berikannya itu sesuai dengan keinginan anaknya atau disetujui oleh anaknya.

Faktor tersebut terjadi pada informan B. Orang tuanya sangat khawatir terjerumus ke pergaulan bebas karena banyak kasus atau berita di media cetak maupun di media elektronik (TV). Orang tuanya melihat pergaulan anak-anak remaja sekarang sangat menghawatirkan, karena melihat anaknya sudah terlalu dekat dengan kekasihnya maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka dia menikahkan anaknya. Oleh karena itu orang tua dari informan B memutuskan menjodohkannya dengan orang yang lebih dewasa, agar nantinya ia akan berubah menjadi orang yang lebih baik.

Dari uraian diatas, faktor utama yang menyebabkan perkawinan usia dini di desa Gembong Kulon adalah Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), faktor ekonomi dan juga faktor orang tua. Hal tersebut dipengaruhi oleh lingkungan kehidupan keseharian anak. Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua mengakibatkan anak menjadi salah dalam pergaulan sehingga terjerumus ke pergaulan bebas yang berbau negatif yang mengakibatkan terjadinya perkawinan usia dini. Selain itu kemajuan teknologi yang pesat membuat para remaja dapat mengakses berbagai konten pornografi. Dalam hal ini berarti pemikiran yang belum begitu matang dan lemahnya nilai-nilai keagamaan membuat anak menjadi mudah terpengaruh oleh lingkungan kesehariannya terutama dengan teman sebaya.

B. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang agar Masyarakat Desa Gembong Kulon Mempunyai Kesadaran Tentang Undang-Undang perkawinan

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari sistem Kementerian Agama. Sedangkan Kementerian Agama mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama. KUA merupakan bagian dari unsur pelaksana sebagian tugas Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan.

1. Letak Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang

Kantor Urusan Agama merupakan instansi terkecil Kementrian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA Kecamatan Talang terletak di Jalan Raya Projosumarto, II Nomor 02 Talang. Gedung kantor ini dibangun dan ditempati sejak tahun 1984 diatas tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Tegal dengan luas tanah 577 M² dan luas bangunan 227 M².

2. Batas Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang

Batas wilayah kerja KUA Kecamatan Talang sebagaimana batas wilayah Kecamatan Talang, yaitu :

Sebelah utara : Kecamatan Dukuhturi dan Kecamatan Kramat

Sebelah timur : Kecamatan Tarub

Sebelah selatan : Kecamatan pangkah dan Kecamatan Adiwerna

Sebelah barat : Kecamatan Adiwerna dan Kecamatan Dukuhturi

3. Jumlah Desa Kecamatan Talang

Wilayah hukum KUA Kecamatan Talang sebagaimana wilayah hukum Kecamatan Talang, yaitu ada 19 desa yakni : Pegirikan, Pekiringan, Gembong Kulon, Pasangan, Langgen, Kajen, Kebasen, Tegal wangi, Talang, Pesayangan, Dukuh malang, Bengle, Kaligayam, Kaladawa, Cangkring, Dawuhan, Wangandawa, Getas kerep dan Pacul

4. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang

Jumlah Perkawinan Usia Dini Atau Di Bawah Umur Di KUA Kec. Talang

2017	2018	2019
38	37	27

Keterangan : data di peroleh dari KUA kec. Talang

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2017 dan tahun 2018 jumlah perkawinan usia dini atau di bawah umur terbilang cukup tinggi dengan jumlah 38 dan 37 dari 19 desa di Kecamatan Talang. Pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan jumlah 27. Menurut Kepala KUA Kecamatan Talang bapak Risyanto, faktor utama yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini di Kecamatan Talang adalah faktor Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD).

Upaya yang dilakukan untuk menekan masalah-masalah sosial yang ditimbulkan terhadap dampak perkawinan usia dini adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum mengenai materi tentang perkawinan secara komprehensif. Karena perkawinan yang dilakukan pada umumnya oleh orang dewasa terkadang sudah tidak memandang lagi pada sebuah

profesi, agama, suku, bangsa, apakah dia orang miskin ataukah dia orang kaya, apakah tempat tinggalnya di kota ataupun di desa. Sayangnya tidak semua orang bisa mengerti dan memahami tujuan dan hakikat dari perkawinan yang seutuhnya yakni untuk mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya baik lahir maupun bathin⁴³.

Batas umur dalam melakukan perkawinan adalah sangat penting diketahui dan dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena perkawinan menghendaki kematangan secara psikologis dan sosiologis. Selain daripada itu, umur yang masih mudah melakukan perkawinan dapat mengakibatkan meningkatnya kasus-kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri⁴⁴.

Menurut Risyanto, salah satu cara atau upaya untuk dapat menekan dampak perkawinan usia dini di Kecamatan Talang dan agar masyarakat mempunyai kesadaran tentang Undang-undang Perkawinan adalah⁴⁵ :

- a. Melakukan sosialisasi tentang Undang-undang Perkawinan atau menjelaskan bahwa perkawinan dibawah umur cukup berbahaya terhadap pasangan yang melakukannya. Sehingga dengan penjelasan tersebut warga masyarakat terkesimat untuk sadar dan taat tidak melakukan perkawinan dibawah umur.

⁴³ Kamaruddin, *"Problematik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Kendari"*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 10 No. 2, Juli 2017, Hlm. 112

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Wawancara dengan Risyanto, Kepala KUA Kecamatan Talang, di KUA kecamatan Talang, tanggal 2 Januari 2020 jam 13.00 WIB.

- b. Dengan penundaan usia perkawinan, artinya sedapat mungkin bagi calon suami atau istri untuk melihat secara seksama bagaimana manfaat dan mudharat ketika melakukan perkawinan dibawah umur, sehingga harus ada batas toleransi.
- c. Memberdayakan anak dengan informasi dan keterampilan, artinya agar anak memiliki pengetahuan yang baik mengenai diri mereka dan agar mereka mampu mengatasi kesulitan sosial dan ekonomi baik secara jangka panjang maupun jangka pendek. Misalnya edukasi mengenai pernikahan anak dan kesehatan sexual dan reproduksi dengan menggunakan berbagai media.

Berdasarkan penjelasan dari Kepala KUA Kecamatan Talang bahwa tidak hanya masyarakat desa Gembong Kulon saja yang di beri sosialisasi atau pengarahan tetapi semua desa yang berada di wilayah Kecamatan Talang yang hendak melaksanakan perkawinan di bawah umur⁴⁶.

Untuk upaya yang dilakukan pemerintah Desa Gembong Kulon untuk menangani perkawinan usia dini adalah dengan cara dinasehati yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan pada saat ada masyarakat yang mendaftar pernikahan tetapi dari persyaratan terdapat umur yang tidak sesuai dengan Undang-undang perkawinan di Indonesia.

Mengatasi perkawinan usia dini di Desa Gembong Kulon dengan sosialisasi ke masyarakat dengan cara pada saat ada kegiatan kemasyarakatan misalnya peringatan maulid nabi, gotong royong,

⁴⁶ *Ibid*, jam 13.10 WIB.

posyandu dan lain-lain, dengan memberikan motivasi kepada orang tua untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi paling tidak sampai lulus SMA/SMK kepada anaknya dengan begitu anak-anak yang ingin melakukan perkawinan sudah mencukupi umur dan sesuai dengan undang-undang perkawinan sehingga tidak adanya pelanggaran terhadap undang-undang. Bukan hanya sekedar berupa sosialisasi dan pemberian informasi, pemerintah desa juga wajib bersikap tegas dan konsisten dan memberikan ijin kepada warganya untuk menikah muda.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, mengenai faktor-faktor yang menyebabkan adanya perkawinan usia dini di desa Gembong Kulon dan upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Talang masyarakat agar Desa Gembong Kulon mempunyai kesadaran tentang Undang-Undang perkawinan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Beberapa penduduk yang melakukan perkawinan usia dini

No	Informan	Tingkat Pendidikan Terakhir	Usia Menikah
1	A	SMP	15 Tahun
2	B	SMP	16 Tahun
3	C	SMP	15 Tahun
4	D	SMP	16 Tahun

1. Penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Desa Gembong Kulon adalah karena Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), faktor ekonomi dan faktor karena orang tua. Faktor Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) karena dari hubungan asmara (pacaran) Kemudian berlanjut hingga 'kumpul kebo' sehingga terjadi suatu kehamilan diluar perkawinan. Faktor ekonomi untuk meringankan beban orang tuanya sehingga sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi keluarganya dan yang faktor orang tua karena Orang

tuanya sangat khawatir terjerumus ke pergaulan bebas karena banyak kasus yang beredar di media cetak maupun di media elektronik (TV).

2. Peran yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang agar masyarakat Desa Gembong Kulon mempunyai kesadaran tentang Undang-Undang perkawinan adalah dengan melakukan sosialisasi atau menjelaskan bahwa perkawinan dibawah umur cukup berbahaya terhadap pasangan yang melakukannya dan penundaan perkawinan maksudnya agar calon suami atau istri untuk melihat secara seksama bagaimana manfaat dan mudharat ketika melakukan perkawinan dibawah umur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di berikan saran sebagai berikut :

1. Bagi remaja hendaknya lebih memahami faktor-faktor dari perkawinan usia dini sehingga diharapkan remaja mempunyai pandangan dan wawasan kedepan dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
2. Bagi pasangan yang belum menikah sebaiknya lebih memperhatikan dampak yang akan timbul akibat dari perkawinan usia dini.
3. Bagi orang tua perlu di berikan pemahaman tentang persepsi terhadap perkawinan usia muda tidak selalu meringankan beban ekonomi orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Gesa, Rabbil Sonya, *“Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)”*, Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
- Guswintari, Ria, *”Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Perkara Nomor: 0010/Pdt.P/2013/PA.Sal)”* Skripsi Sarjana Hukum fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hadiyan, Edwin, *Membangun Kesadaran Masyarakat Mengenai Tradisi Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Hak Anak*, jurnal, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2016.
- Hasan, M Iqbal, *”Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya”* , Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasyim, Dahlan, *Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan*, jurnal, Volume XXIII No. 2 April–Juni 2007.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama RI, 2003.
- Kamaruddin, *Problematisasi Perkawinan Di Bawah Umur di Kota Kendari*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 10 No. 2, Juli 2017.
- M. Ibadurrahman, *“Perkawinan Usia Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kaliwungu Kab.Kendal”* , Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Jurnal, Yudisia, Vol.7, No.2, Desember 2016.
- Muthiah, Aulia , *hukum islam dinamika seputar hukum keluarga*, Yogyakarta: pustaka baru pres, 2017.

Sabili, Afan , *Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonian Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)*, Semarang, 2018.

Shomat, Abd , *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Goup, 2010.

Sriharyati, Teti, *Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur di Desa Blandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes* (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2012).

Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*” , Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8.

Syarifuddin, Amir , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Prenada Media, 2007.

Zulfiani, “ *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”, *Jurnal Hukum*, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember, 2017.

Peraturan dan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Agama No.19 tahun 2018 Tentang Pencatatan perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wawancara

Wawancara dengan Risyanto, Kepala KUA Kecamatan Talang, di KUA kecamatan Talang, tanggal 2 Januari 2020 jam 13.00 WIB.

Wawancara dengan A'yun Inaroh, Kepala Desa Gembong Kulon, di Kantor Balaidesa Gembong Kulon, tanggal 13 Januari 2020 jam 09.00 WIB.

Wawancara dengan Rosidi, warga Gembong Kulon, di rumah bapak Rosidi, tanggal 13 Januari 2020 jam 20.00 WIB

.

Online

Asep Sihabul Millah, <https://www.scribd.com/doc/218786741/PERAN-PENGHULU-DALAM-IMPLEMENTASI-UU-NOMOR-1974-TENTANG-PERKAWINAN-pdf>

Zulfiani, <https://media.neliti.com/media/publications/240416-kajian-hukum-terhadap-perkawinan-anak-di-e5ca613d.pdf>

<http://eprints.ums.ac.id/55630/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>

<http://eprints.walisongo.ac.id/4268/1/082111022.pdf>

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Krisna Adhitiya
NPM : 5116500131
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 24 Februari 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat :Jalan Mute No.6 Gembong Kulon RT.13/RW.05
Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

Riwayat Pendidikan :

No	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SD N 01 Gembong Kulon	2004	2010
2	SMP N 1 Talang	2010	2013
3	SMA N 1 Pangkah	2013	2016
4	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2016	2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 27 Juli 2020

Hormat saya,



Muhammad Krisna Adhitiya